

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA
TAHUN 2025**



**Jl Wolter Monginsidi No. 105 Kel. Pengajaran
Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi
Lampung
TELEPON: (0721) 486752**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA
Alamat	Jalan Wolter Monginsidi No. 105 Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
Nomor Telepon	(0721) 486752

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

PT BPR Lampung Bina Sejahtera memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Lampung Bina Sejahtera dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Bandar Lampung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Lampung Bina Sejahtera didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Lampung Bina Sejahtera.

BPR Lampung Bina Sejahtera telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Lampung Bina Sejahtera selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Lampung Bina Sejahtera terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Hendrik Susanto
	Jabatan	Direktur Utama
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun, Mewujudkan dan Mengimplementasikan Visi dan Misi BPR. Menyusun dan Merealisasikan Target atau Sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam RBB dan Rencana Strategis BPR melalui kegiatan operasional BPR dengan berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik (GCG) dan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principles). Mewakili BPR untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun hasil pengawasan dari otoritas lain. Membuat dan atau Menyampaikan laporan tahunan BPR sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus BPR. Menyelenggarakan RUPS baik yang bersifat biasa, luar biasa maupun tahunan. Mengadakan atau Melakukan Perubahan- Perubahan dalam Struktur Organisasi disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kegiatan usaha BPR. 		
2.	Nama	Denni Agustiono
	Jabatan	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundang- Undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principles). Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundangan-Undangan lain yang berlaku. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Direksi BPR tidak menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundang- Undangan lain yang berlaku. Memantau dan Menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan 		

- Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.
5. Memantau dan Menjaga Kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas lainnya.
 6. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkini dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
 7. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan telah menerapkan manajemen risiko yang memadai serta efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis BPR.
2. Tingkat Kesehatan BPR telah dipertahankan dalam posisi sehat.
3. Semua temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun oleh Audit Ekstern (KAP) telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2025.
4. Semua temuan audit intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan tugas masing-masing.
5. Telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan peraturan perusahaan maupun ketentuan lainnya yang ada di BPR.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Ferina Wiraswasti
	Jabatan	Komisaris Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:		
a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		
b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank		
c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan		
d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
2.	Nama	Ketut Ita Purnamasari
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward/ apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Lampung Bina Sejahtera.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2024.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Hendrik Susanto
----	------	-----------------

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Denni Agustiono
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ferina Wiraswasti
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Ketut Ita Purnamasari
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Nihil

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Hendrik Susanto
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Denni Agustiono
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Ferina Wiraswasti
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Ketut Ita Purnamasari

Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Nihil

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Hendrik Susanto
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Denni Agustiono
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Ferina Wiraswasti
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Ketut Ita Purnamasari
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank lain dan perusahaan lain.
 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tidak ada.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.
 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Hendrik Susanto
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Denni Agustiono
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ferina Wiraswasti
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan	Tidak ada

	Pemegang Saham Lain di BPR	
2.	Nama	Ketut Ita Purnamasari
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.
 Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp540.800.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp380.680.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp148.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp85.000.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
---------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp600.580.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp434.000.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 10,00 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 5,00 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 4,00 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,25 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,00 : 1

Nihil

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 09 Januari 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pencapaian Target Bisnis akhir tahun 2023 (Semester II Tahun 2023)

2. Tanggal Rapat 22 April 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi Kinerja BPR Triwulan 1 2024

3. Tanggal Rapat 25 Juli 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

	Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK.	
4.	Tanggal Rapat	20 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan SDM.	
5.	Tanggal Rapat	13 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pencapaian akhir tahun 2025	

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 5 (lima) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2025

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ferina Wiraswasti
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ketut Ita Purnamasari
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode tahun 2025 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Nihil.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 30 April 2026

PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA


Hendrik Susanto
Direktur Utama




Denni Agustiono
Dir YMF Kepatuhan